

Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)

Muh Farhan Ar Rusyda¹, Trubus Rahardiansah²

Magister Hukum Bisnis, Universitas Trisakti^{1,2}

Email: Farhanarrusyda@gmail.com¹, trubus@trisakti.ac.id²

Informasi

Volume : 2
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The development of the investment climate in Indonesia is marked by the establishment of a Sovereign Wealth Fund (SWF) named Daya Anagata Nusantara (Danantara). This study aims to analyze the legal aspects concerning the role and position of Danantara as an SWF entity in Indonesia, while also comparing it with the sovereign wealth funds of Malaysia and Singapore. The research method employed is normative legal research using conceptual and comparative approaches. The findings indicate that Danantara was established based on the mandate of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. As the implementing body, Danantara is tasked with managing SOEs, regulating dividends from investment holdings, operational holdings, and SOEs, and approving the addition or reduction of state capital participation in SOEs sourced from dividend management. The study also compares Danantara with Singapore's Temasek Holdings and Malaysia's Khazanah Nasional Berhad, revealing differences in the establishment and operation of each SWF.

Keywords: Danantara, Investment, Sovereign Wealth Fund

Abstrak

Perkembangan iklim investasi di Indonesia ditandai dengan hadirnya Sovereign Wealth Fund bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait peran dan kedudukan Danantara sebagai badan SWF di Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan SWF milik Malaysia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai pelaksana di lapangan, Danantara memiliki tugas mengelola BUMN, mengatur dividen dari holding investasi, holding operasional, serta BUMN, dan menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Penelitian ini juga membandingkan Danantara dengan Temasek Holdings milik Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik Malaysia, dimana terdapat perbedaan dalam hal pembentukan dan operasional masing-masing SWF.

Kata Kunci: Danantara, Investasi, Sovereign Wealth Fund

A. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang. Keberadaan dana investasi jangka panjang yang dikelola secara profesional dan transparan sangat diperlukan guna menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara, sehingga pembangunan ekonomi menjadi kebutuhan mendesak.¹ Seiring perkembangan zaman, sektor investasi juga mengalami transformasi. Investasi kini tidak hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial.² Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi, salah satunya melalui pembentukan *Sovereign wealth fund* (SWF). SWF merupakan dana investasi milik negara yang dibentuk untuk mengelola aset, terutama aset luar negeri, secara jangka panjang.³ Kehadiran SWF menjadi strategi penting dalam pengelolaan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta meningkatkan daya saing bangsa.

Tujuan pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) secara umum adalah untuk mengelola kelebihan anggaran negara, pendapatan yang berasal dari sektor sumber daya alam, serta investasi-investasi strategis lainnya. Berdasarkan laporan *International Working Group of Sovereign Wealth Funds* (IWG) tahun 2008, terdapat tiga klasifikasi utama SWF, yaitu:⁴ (1) SWF yang dibentuk sebagai entitas hukum tersendiri dengan kedudukan hukum independen, memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara hukum, serta diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi dasar pembentukannya; (2) SWF yang berbentuk badan usaha milik negara atau perusahaan negara, seperti *Temasek Holdings* dan *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) dari Singapura, yang tunduk pada ketentuan hukum

¹ Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Edisi Kedua. Makassar: CV. Nur Lina, Hal. 6.

² Dhaniswara K. Harjono. (2017). *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal. 6.

³ Roland Beck and Michael Fidora, *The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets*, *Intereconomics*, December 2008, DOI:10.1007/s10272-008-0268-5

⁴ Kemenkeu.go.id. *Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>. (diakses pada 22 Maret 2025).

korporasi dan/atau peraturan khusus mengenai SWF apabila tersedia; dan (3) SWF yang berbentuk himpunan aset yang tidak memiliki status badan hukum tersendiri, sehingga tidak berdiri sebagai entitas hukum yang otonom.

Kumpulan aset yang membentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dapat dimiliki secara langsung oleh pemerintah atau melalui lembaga independen seperti bank sentral. Salah satu bentuk konkret SWF adalah Temasek Holdings di Singapura, yang dibentuk oleh Pemerintah Singapura pada tahun 1974.⁵ Temasek didirikan dengan tujuan untuk menciptakan suatu entitas yang secara khusus berfokus pada kepemilikan dan pengelolaan dana investasi dalam kerangka bisnis yang berorientasi komersial. Pembentukan Temasek dilandaskan pada ketentuan dalam *Singapore Companies Act* Tahun 1974, dengan Menteri Keuangan Singapura bertindak sebagai pemegang saham tunggal. Ruang lingkup kegiatan Temasek mencakup berbagai sektor strategis seperti transportasi, telekomunikasi, ilmu hayati dan ketahanan pangan, media dan teknologi, jasa keuangan, sektor konsumsi, serta *real estate*. Sebagian besar portofolio investasinya berbentuk ekuitas yang secara langsung dimiliki oleh pemegang saham, dengan tujuan untuk mendorong transformasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan kelas menengah, serta memperkuat keunggulan komparatif nasional.⁶ Selain Singapura, Malaysia juga memiliki entitas SWF yang dikenal dengan nama Khazanah Nasional Berhad. Entitas ini didirikan berdasarkan ketentuan *Companies Act Malaysia* Tahun 1965, dan secara resmi beroperasi sejak 3 September 1993 sebagai sebuah perusahaan terbatas publik.⁷

Khazanah Nasional Berhad, selain bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan kekayaan jangka panjang negara, juga memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan suatu entitas khusus yang memiliki kompetensi dalam bidang investasi dan manajemen bisnis.⁸ Dalam menjalankan fungsinya, Khazanah mengusung dua tujuan utama, yakni tujuan komersial dan tujuan strategis. Tujuan komersial mencakup upaya untuk meningkatkan nilai aset keuangan serta melakukan diversifikasi portofolio investasi sebagai strategi mitigasi risiko melalui penyebaran investasi ke berbagai instrumen dan sektor. Dengan latar belakang sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki potensi

⁵ Annisa Ayu Artanti. "Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi". <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi> (diakses pada 22 Maret 2025).

⁶ Tempo. Com. Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. <https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo> (diakses pada 22 Maret 2025).

⁷ International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF). Khazanah Nasional Berhad. <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>. (diakses pada 22 Maret 2025)

⁸ Sinar Harian. Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>. (diakses pada 22 Maret 2025).

ekonomi yang signifikan, Indonesia dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan investasi yang akuntabel dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu entitas *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang menonjol di Indonesia adalah Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pembentukan Danantara didasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya.⁹ Danantara memiliki mandat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengoptimalkan perolehan dividen bagi negara, serta secara aktif berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga dibentuk sebagai entitas pengelola investasi strategis yang memiliki mandat untuk mengkonsolidasikan serta mengoptimalkan portofolio investasi pemerintah, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber utama investasi yang dikelola Danantara berasal dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁰ Dalam konteks perbandingan, Danantara menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek pembentukan hukum, struktur kelembagaan, serta fungsi operasional jika dibandingkan dengan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di negara lain, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Dengan karakteristiknya yang unik, Danantara memiliki peran strategis dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia, sehingga pembahasan dalam tulisan ini menjadi relevan sebagai upaya untuk mengkaji secara komprehensif konsepsi dasar, kedudukan hukum, serta peran fungsional Danantara sebagai entitas SWF nasional. Melalui pendekatan komparatif terhadap praktik-praktik terbaik dari negara lain yang telah berhasil dalam pengelolaan SWF, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keunggulan maupun kelemahan dalam sistem pengelolaan SWF yang saat ini diterapkan di Indonesia.

Dari hasil perbandingan tersebut, diharapkan muncul berbagai pertimbangan normatif dan kebijakan yang dapat diakomodasi oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan perbaikan terhadap kerangka hukum dan tata kelola Danantara di masa mendatang. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah ilmu hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen akademik yang mendukung optimalisasi pengelolaan investasi negara melalui Danantara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁰ Danantara Indonesia Sovereign Fund. Daya Anagata Nusantara: Untuk Kemakmuran Indonesia. <http://www.danantara.id/>. (diakses pada 19 Maret 2025)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji aspek normatif terkait pengaturan serta kedudukan hukum Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sementara itu, pendekatan perbandingan diterapkan guna menganalisis posisi dan fungsi Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dengan membandingkannya terhadap model SWF yang telah diterapkan di Malaysia (Khazanah Nasional Berhad) dan Singapura (Temasek Holdings). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus utama pada penguraian secara sistematis dan analisis mendalam terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembentukan, kedudukan, dan fungsi Danantara sebagai SWF di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik kelembagaan SWF antarnegara, sehingga dapat memberikan landasan evaluatif terhadap kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan investasi negara melalui Danantara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), suatu entitas yang dirancang untuk menjalankan fungsi penasihat strategis dalam pengelolaan investasi dan dana publik nasional. Konsepsi Danantara mengadopsi model *Sovereign Wealth Fund* (SWF), yakni lembaga pengelola aset negara yang bersifat independen dan telah banyak diterapkan di berbagai yurisdiksi sebagai instrumen stabilisasi fiskal dan akselerasi pembangunan ekonomi. Secara umum, sumber pendanaan SWF berasal dari cadangan devisa, hasil privatisasi, surplus anggaran, atau pendapatan dari sektor sumber daya alam. Bagi Indonesia, keberadaan SWF seperti Danantara berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, khususnya dalam jangka pendek, tanpa menambah beban utang

negara.¹¹ Beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan pengelolaan SWF sebagai motor pembangunan, salah satunya adalah Norwegia. Negara tersebut telah mengonversi pendapatan dari sektor minyak dan gas menjadi salah satu SWF terbesar di dunia, dengan total aset yang melampaui 1 triliun dolar AS untuk populasi sekitar 5,33 juta jiwa. Hal ini menjadikan setiap warga Norwegia secara teoritis memiliki dana rata-rata sekitar 207.000 dolar AS.

Dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi global, mengikuti dinamika pasar internasional secara terdiversifikasi. Dengan portofolio yang mencakup investasi di 74 negara, lebih dari 9.200 perusahaan, serta penguasaan sekitar 1,5% saham dari seluruh perusahaan publik dunia, SWF Norwegia menjadi representasi model pengelolaan kekayaan negara yang transparan, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan antar-generasi. Sovereign Wealth Fund (SWF) Norwegia pertama kali didirikan pada tahun 1996 sebagai instrumen untuk melestarikan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas, sekaligus sebagai strategi jangka panjang dalam melakukan diversifikasi struktur ekonomi nasional. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut bahkan mampu menyumbang hingga seperempat dari anggaran tahunan pemerintah Norwegia. Meskipun secara konseptual memiliki tujuan yang serupa, model SWF yang dikembangkan di Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda. SWF Indonesia lebih menitikberatkan pada peran sebagai mekanisme penggalangan serta pengelolaan investasi asing untuk pembiayaan berbagai proyek strategis nasional.

Sebaliknya, di banyak negara maju, SWF umumnya difungsikan untuk mengelola surplus fiskal atau kekayaan negara, dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi makro jangka panjang, termasuk sebagai penyangga ketika terjadi gejolak ekonomi global. Di Indonesia, SWF yang telah beroperasi saat ini memiliki modal awal sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat yang disetor oleh pemerintah, dan telah berhasil menarik minat sejumlah investor asing, terutama karena nilai ekonomis dan prospek jangka panjang dari proyek-proyek investasi yang ditawarkan. Bonus demografi Indonesia yang menjanjikan juga menjadi faktor strategis yang meningkatkan daya tarik investasi melalui SWF nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan produktivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur secara masif, sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi. Langkah ini dipandang strategis mengingat peringatan Bank Dunia mengenai potensi Indonesia terjebak dalam middle income trap, yaitu

¹¹ Hamalatul Qurani. "Mengupas Konsep Sovereign Wealth Fund Indonesia". www.hukumonline.com (diakses Pada tanggal 28 Maret 2025).

kondisi stagnasi pada tingkat pendapatan menengah tanpa mampu melakukan lompatan menuju status negara maju apabila momentum demografi tidak dimanfaatkan secara efektif. Namun demikian, pendekatan pembangunan yang bergantung pada pembiayaan konvensional, khususnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), justru memberikan tekanan yang signifikan terhadap neraca keuangan negara. Pembiayaan infrastruktur berskala besar telah mendorong peningkatan utang, baik pada tingkat korporasi negara maupun pada tingkat nasional. Ketimpangan antara meningkatnya kebutuhan pendanaan dengan kapasitas fiskal yang terbatas menjadi persoalan struktural. Di sisi lain, arus investasi asing langsung (FDI) cenderung stagnan, yang secara simultan memperbesar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Sovereign Wealth Fund (SWF) hadir sebagai alternatif pendanaan yang lebih berkelanjutan dengan membagi risiko dan potensi keuntungan bersama investor, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. SWF diharapkan dapat meningkatkan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju. Memanfaatkan momentum bonus demografi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 6% hingga 2030, pemerintah menempatkan harapan besar pada SWF sebagai solusi pembiayaan tanpa menambah beban utang negara. Namun, efektivitas SWF memerlukan waktu untuk diukur dan harus diiringi pengelolaan yang transparan, profesional, dan berprinsip tata kelola baik guna mencegah risiko korupsi dan menjaga kepercayaan investor. Dengan demikian, SWF diyakini dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Peran Dan Kedudukan Danantara Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund Di Indonesia

Dana kekayaan negara, yang dikenal sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), merupakan dana investasi khusus yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan memegang atau menguasai aset asing secara jangka panjang.¹² Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai SWF resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengelola aset negara yang mencapai nilai sekitar 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 14.665 triliun.¹³ Berbeda dengan SWF pada beberapa negara lain yang biasanya bersumber

¹² Muhammad Jamaludin. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. *AL ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol. 1, No. 2. Hal. 285.

¹³ CNN Indonesia. Mengenal Sovereign Wealth Fund di Tengah Peluncuran Danantara. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250224145053-92-1201856/mengenal-sovereign-wealth-fund-di-tengah-peluncuran-danantara>. (diakses Pada tanggal 20 Maret 2025).

dari surplus keuangan negara seperti pendapatan dari sumber daya alam minyak, gas, mineral cadangan devisa, atau hasil privatisasi aset negara, Indonesia mengadopsi pendekatan yang berbeda. Danantara tidak menggunakan dana berbasis sumber daya alam, melainkan berfokus pada pengembangan sektor infrastruktur dan ekonomi digital guna menarik minat investasi global yang ingin memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁴ Secara kelembagaan, Indonesia telah memiliki Indonesia Investment Authority (INA), yang memiliki fungsi utama dalam mengelola dan mengembangkan aset negara.

Indonesia Investment Authority (INA) didirikan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja sebagai lembaga Sovereign Wealth Fund dengan kewenangan khusus untuk mengelola investasi pemerintah pusat, yang didukung oleh regulasi memberikan otonomi manajemen serta fleksibilitas operasional. Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi global guna mempercepat kesejahteraan masyarakat, pada 4 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengesahkan pembentukan Danantara sebagai badan yang bertugas mengelola dividen dari holding operasional, holding investasi, dan holding BUMN secara menyeluruh. Pembentukan Danantara tidak menghapus keberadaan INA, melainkan didasari oleh perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menjadi landasan hukum bagi pendirian Danantara. Peraturan terbaru tersebut mengatur tugas dan fungsi Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan INA tetap berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Terdapat rencana untuk mengintegrasikan INA ke dalam struktur Danantara di masa mendatang guna memperkuat koordinasi dan efektivitas pengelolaan investasi negara.

Penerapan prinsip *hands-on ownership* dan *hands-on management* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuntut keseimbangan yang tepat antara kontrol oleh pemegang saham dan otonomi operasional perusahaan. Sebagai super holding BUMN, Danantara mengedepankan keterlibatan aktif pemerintah selaku pemegang saham dalam pengawasan dan penetapan arah strategis. Di sisi lain, manajemen BUMN harus memiliki kompetensi profesional serta independensi dalam menjalankan fungsi operasional secara efisien.¹⁵ Peran pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai regulator,

¹⁴ Bari Baihaqi. Danantara Disebut Sebagai SWF Terkuat ke 6 di Dunia. <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/216345/danantara-disebut-sebagai-swf-terkuat-ke-6-di-dunia>. (diakses Pada tanggal 21 Maret 2025).

¹⁵ Sampor Ali. Menenal Danantara, 'Barang Baru' di Era Prabowo. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/menal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>. (diakses Pada tanggal 21 Maret 2025). 19 Willa

mencakup kewenangan memberikan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengajukan agenda RUPS, serta memperoleh akses terhadap data dan dokumen perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga berwenang menetapkan pedoman dan kebijakan strategis di bidang akuntansi dan keuangan, pengembangan investasi, serta operasional dan pengadaan barang dan jasa. Sebagai pelaksana di lapangan, Danantara bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN, pengaturan dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN, serta memberikan persetujuan atas penambahan atau pengurangan penyertaan modal negara yang bersumber dari pengelolaan dividen. Selain itu, Danantara berperan dalam menyetujui proses restrukturisasi BUMN, meliputi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, serta pembentukan holding investasi, holding operasional, dan BUMN.

Lembaga ini juga memiliki kewajiban untuk mengesahkan dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi serta holding operasional.¹⁶ Mekanisme tata kelola tersebut menjamin agar BUMN tetap fokus pada pencapaian target nasional, sambil mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan demikian, sinergi yang optimal antara *hands-on ownership* dan *hands-on management* akan meningkatkan daya saing BUMN sekaligus melindungi kepentingan publik yang menjadi tanggung jawab negara melalui perusahaan tersebut.

Pengelolaan BUMN tidak hanya bertujuan komersial, melainkan juga memenuhi kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), sebagaimana dilakukan oleh entitas seperti PLN dan Pertamina. Tujuan pendirian Danantara sejalan dengan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai Lembaga Pengelola Investasi, yang merupakan respons atas kebutuhan pembiayaan dan peningkatan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, lembaga ini bertujuan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam skema dana abadi guna mendukung pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, pendirian Danantara pada dasarnya bertujuan positif, yaitu mengkonsolidasikan pengelolaan aset negara dari

Wahyuni. Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya, HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>. (diakses Pada tanggal 22 Maret 2025).

¹⁶ Willa Wahyuni. Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya, HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/?page=2>. (diakses Pada tanggal 22 Maret 2025).

¹⁷ Dimas Cahya Kusuma. (2022) Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal. 64.

perusahaan-perusahaan BUMN agar lebih transparan dan terkoordinasi secara efektif. Melalui keberadaan holding company ini, setiap perusahaan akan lebih terbuka karena Danantara memiliki kewenangan langsung dalam penunjukan serta pengawasan dewan komisaris dan dewan direksi. Sebelumnya, proses penunjukan tersebut dilakukan oleh kementerian tanpa disertai alasan dan evaluasi yang memadai.¹⁸ Selain itu, Danantara memegang peran strategis sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor-sektor prioritas. Sebagai lembaga pengelola investasi negara, Danantara diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-BUMN dan menarik investasi asing demi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan model pengelolaan berbasis hukum administrasi negara, mekanisme Danantara menawarkan fleksibilitas lebih besar dibandingkan skema pembiayaan yang hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara juga diharapkan dapat mendukung BUMN dalam mewujudkan transparansi dan tata kelola yang baik. Dalam pengelolaan BUMN, Danantara memastikan seluruh aktivitas dijalankan sesuai prinsip *good corporate governance*, melibatkan investor profesional, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi pada proyek-proyek yang didanai.

Perbandingan Badan Sovereign Wealth Fund Di Negara Tetangga

Singapura

Singapura merupakan salah satu negara pemilik Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia melalui Temasek Holdings, yang telah berhasil mengelola aset negara secara signifikan sejak pendiriannya pada tahun 1974.¹⁹ Temasek dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga yang secara khusus mengelola dan memiliki dana investasi secara komersial. Seiring waktu, Temasek memperluas jangkauannya dengan mendirikan 13 kantor di sembilan negara, antara lain Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, London, Brussels, New York, San Francisco, Washington DC, Mexico City, dan São Paulo. Luasnya jaringan operasional Temasek meningkatkan reputasi Singapura dalam pengelolaan aset negara secara profesional. Hingga 31 Maret 2024, Temasek berhasil mengelola portofolio sebesar S\$389 miliar, setara dengan

¹⁸ Gusti Grehenson. Pakar UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Kemunculan Danantara, Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-ungkap-dampak-positif-dan-negatif-kemunculan-danantara/>. (diakses Pada tanggal 22 Maret 2025).

¹⁹ Annisa Ayu Artanti. Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi>. (diakses pada 18 Maret 2025).

sekitar Rp 4.000 triliun.²⁰ Secara kelembagaan, Temasek didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Singapura tahun 1974, dengan Menteri Keuangan Singapura sebagai pemegang saham tunggal. Temasek aktif dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, telekomunikasi, ilmu hayati dan pertanian pangan, media dan teknologi, layanan keuangan, konsumen, serta real estate.

Sebagian besar investasi Temasek berbentuk ekuitas yang dimiliki langsung oleh pemegang saham dengan tujuan melakukan transformasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan kelas menengah, serta memperkuat keuntungan komparatif.²¹ Pendiriannya dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pentingnya pemisahan antara peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan dengan manajemen bisnis operasional. Dengan demikian, pengelolaan bisnis tidak menjadi tugas pemerintah secara langsung. Prinsip tersebut menjadi dasar pembentukan Temasek oleh Pemerintah Singapura sebagai lembaga yang mengelola aset negara secara komersial. Sebagai perusahaan yang beroperasi secara komersial, Temasek diawasi oleh Dewan Direksi Independen yang mayoritas terdiri dari pemimpin bisnis sektor swasta non-eksekutif dan independen, tanpa campur tangan pemerintah. Struktur ini memungkinkan Temasek bekerja secara profesional dan bebas dari pengaruh politik, sehingga mampu bersaing secara setara di pasar.²²

Malaysia

Selain Singapura, Malaysia juga memiliki Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dikenal dengan nama Khazanah Nasional Berhad, yang berfokus pada pengelolaan investasi jangka panjang milik pemerintah Malaysia. Khazanah Nasional Berhad didirikan pada tanggal 3 September 1993 berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Malaysia tahun 1965 sebagai perusahaan terbatas publik.²³ Sejalan dengan tujuan Temasek Holdings di Singapura, Khazanah Nasional Berhad dibentuk untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan lembaga khusus yang mengelola investasi dan manajemen bisnis.²⁴ ebagai SWF, Khazanah memiliki mandat untuk

²⁰ Tempo. Com. Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Jadi Rujukan BP Investasi Danantara. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-jadi-rujukan-bp-investasi-danantara-1161478>. (diakses pada 18 Maret 2025).

²¹ Tempo. Com. Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. <https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo>. (diakses pada 18 Maret 2025).

²² Temasek. Sejarah Temasek. <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>. (diakses pada 18 Maret 2025).

²³ International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSFWF). Khazanah Nasional Berhad. <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>. (diakses pada 18 Maret 2025).

²⁴ Sinar Harian. Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>. (diakses pada 18 Maret 2025).

menumbuhkan kekayaan negara dengan tujuan komersial dan strategis yang berbeda, di mana tujuan komersial mencakup pertumbuhan aset keuangan dan diversifikasi portofolio sebagai strategi pengurangan risiko melalui penyebaran investasi ke berbagai instrumen. Tujuan strategis Khazanah Nasional Berhad adalah untuk menghasilkan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.²⁵ Berdasarkan informasi dari situs resmi Khazanah Nasional, badan ini berfokus pada pencapaian pengembalian investasi yang optimal dengan mempertimbangkan risiko jangka panjang di seluruh portofolionya. Selain itu, Khazanah berperan sebagai katalisator dalam pengembangan sektor-sektor dan perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh di Malaysia, serta berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.²⁶ Perbandingan *antara Sovereign Wealth Fund (SWF) Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia* menunjukkan upaya kedua negara dalam membangun pola investasi jangka panjang yang terstruktur. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan publik secara luas.

Studi Komparatif Terkait Dengan Peran Dan Kedudukan Badan Sovereign Fund Dengan Negara Tetangga.

Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan serta mengoptimalkan investasi pemerintah dengan fokus pada aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN),²⁷ perlu dikaji secara mendalam terkait pengelolaannya, struktur kepengurusan, regulasi hukum, tujuan, serta hasil yang diharapkan dari keberadaannya. Singapura dan Malaysia, yang telah lebih dulu memiliki badan Sovereign Wealth Fund (SWF), dapat dijadikan acuan bagi Indonesia dalam upaya memaksimalkan peran Danantara guna mencapai target yang diinginkan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia, diketahui bahwa kedua badan SWF tersebut berada langsung di bawah Kementerian Keuangan negara masing-masing. Namun, pemerintah tidak terlibat langsung²⁸ dalam pengelolaan operasional bisnis kedua SWF tersebut. Pendekatan ini diterapkan untuk memisahkan secara tegas peran pemerintah sebagai

²⁵ ANTARA. strategi untuk mengurangi risiko dengan cara menyebar dana ke berbagai instrument. <https://www.antaraneews.com/berita/2103118/khazanah-raih-rp11-triliun-dari-penempatan-saham-telekom-malaysia>. (diakses pada 18 Maret 2025).

²⁶ Khazanah Nasional. Memajukan Malaysia Untuk Jangka Panjang. , <https://www.khazanah.com.my/who-we-are/about-us/?lang=ms>. diakses pada tanggal 18 Maret 2025.

²⁷ Danantara Indonesia Sovereign Fund. Daya Anagata Nusantara. Untuk Kemakmuran Indonesia. <http://www.danantara.id/>. (diakses pada 19 Maret 2025).

²⁸ Troy Segal. Temasek Holdings: Apa itu, Bagaimana Cara Kerjanya. <https://www.investopedia.com/terms/t/temasek-holdings.asp>. (diakses pada 19 Maret 2025).

pembuat kebijakan dengan manajemen bisnis serta tata kelola investasi negara, guna menjamin independensi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Berbeda dengan SWF di Singapura dan Malaysia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan di negaranya masing-masing, Indonesia mengesahkan Danantara melalui persetujuan DPR atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. RUU tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 4 Februari 2025,²⁹ yang menjadi landasan hukum pengelolaan Danantara ke depan. Danantara didirikan dengan tujuan mengelola dana investasi dari perusahaan-perusahaan BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Meski dana yang dikelola Danantara berasal dari BUMN, pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Danantara sebagai pengelola tunggal, sementara BUMN berperan sebagai regulator dan pengawas. Salah satu faktor kunci keberhasilan Singapura dalam pengelolaan Temasek Holdings adalah pengawasan yang melibatkan seluruh elemen, termasuk pemerintah, parlemen, dan masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan unik yang dijalankan Singapura untuk memastikan Temasek Holdings sukses dalam meningkatkan peluang investasi serta pertumbuhan ekonomi negara mereka.

Pertama, Presiden Singapura memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direktur serta manajer kunci, termasuk CEO, di mana dewan direksi dan CEO bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, mayoritas anggota dewan dan pejabat kunci Temasek adalah direktur independen yang berasal dari sektor swasta. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya kepentingan yang dapat mengganggu atau merusak tujuan yang ingin dicapai oleh badan SWF tersebut. Kedua, Temasek secara rutin menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Jenderal Pemerintah Singapura. Praktik ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi, sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan atau konflik kepentingan dapat diminimalisir demi keberhasilan pengelolaan dana negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Danantara diperkirakan akan mengelola investasi senilai sekitar Rp9.000 triliun pada tahap awal, dengan membawahi tujuh BUMN besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Selain ketujuh BUMN

²⁹ Randy Wirayuda. Antara Temasek, 1MBD, dan Danantara. <https://historia.id/ekonomi/articles/antara-temasek-1mdb-dan-danantara-6mgE9>. (diakses pada 19 Maret 2025).

tersebut, Danantara juga direncanakan untuk mengelola Indonesia Investment Authority (INA), SWF yang telah terlebih dahulu berdiri di Indonesia. Dengan demikian, total aset yang dikelola (Asset Under Management/AUM) Danantara diperkirakan mencapai sekitar Rp9.049 triliun atau setara dengan US\$571,6 miliar. Ke depan, aset yang dikelola Danantara diperkirakan akan meningkat hingga US\$982 miliar atau sekitar Rp15.547 triliun (dengan kurs Rp15.832 per dolar AS).³⁰ Namun, terdapat sejumlah kontroversi yang menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan Danantara sebagai badan SWF di Indonesia. Pertama, sumber dana Danantara yang berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menimbulkan pertanyaan kritis mengenai mekanisme pengelolaan apabila terjadi kebijakan yang keliru serta bagaimana penyelesaian dampak yang ditimbulkan. Hal ini penting karena kesalahan dalam pengelolaan dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Salah satu aspek yang menimbulkan kekhawatiran signifikan adalah potensi terjadinya monopoli ekonomi akibat penguasaan hampir seluruh aset BUMN oleh Danantara. Dengan posisi dominan tersebut, Danantara berpeluang menguasai berbagai sektor strategis seperti energi, infrastruktur, keuangan, hingga industri manufaktur. Kondisi ini berisiko menghambat persaingan usaha yang sehat, khususnya bagi perusahaan swasta yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya sebesar yang dimiliki oleh Danantara.³¹ Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai terkait tata kelola pengelolaan dana BUMN yang akan dialokasikan ke Danantara, sehingga transparansi pengelolaan masih menjadi isu utama. Selain itu, Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menjadi dasar hukum pembentukan Danantara, menyatakan bahwa kerugian Danantara tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Sementara itu, Pasal 3G ayat (1) Undang-Undang yang sama mengatur bahwa modal Danantara bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN), berupa dana tunai, barang milik negara, dan saham negara pada BUMN, serta sumber lain yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut.

Pendapat Muhammad Saleh, peneliti *Center for Economics and Law Studies* (Celios),

³⁰ Revo M. RI Punya Danantara: Ini 10 Dana Investasi Pemerintah Penguasa Dunia. , <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241107110729-128-586396/ri-punya-danantara-ini-10-dana-investasi-pemerintah-penguasa-dunia>. (diakses pada 19 Maret 2025).

³¹ Sintia Devianti, Danantara: Ancaman Monopoli, Transparansi, dan Dampak Lingkungan dalam Program Hilirisasi, <https://www.kompasiana.com/sintia22796/67bd3cc034777c5abc7e84c2/danantara-ancaman-monopoli-transparansi-dan-dampak-lingkungan-dalam-program-hilirisasi?page=all#:~:text=Jika%20tidak%20dikelola%20dengan%20baik,ekologis%20yang%20merugikan%20masyarakat%20luas.&text=Salah%20satu%20aspek%20yang%20paling,seluruh%20aset%20BUMN%20oleh%20Danantara>. (diakses pada 27 Maret 2025)

menyatakan bahwa pengecualian kerugian Danantara dari kategori kerugian keuangan negara berpotensi menciptakan “ruang abu-abu” dalam pengelolaan dana publik, termasuk pajak masyarakat, yang dapat disalahgunakan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama jika di masa depan terjadi kerugian yang berdampak pada masyarakat, mengingat sebagian dana investasi Danantara berasal dari bank-bank di Indonesia.³² Struktur kepengurusan Danantara saat ini menunjukkan potensi kerentanan terhadap pengaruh politik. Contohnya, posisi CEO dipegang oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, sementara Ketua Dewan Pengawas diisi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Mengingat kedudukan keduanya setara secara hierarkis, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas mekanisme pengawasan, yaitu siapa yang akan mengawasi dan siapa yang menjadi objek pengawasan, sehingga menimbulkan risiko lemahnya fungsi kontrol internal.³³

Prinsip Santiago, sebagaimana dikutip dari *International Forum of Sovereign Wealth Funds* (IFSWF), menekankan pentingnya transparansi, tata kelola yang baik, akuntabilitas, serta praktik investasi yang bijaksana dalam pengelolaan SWF. Salah satu poin kunci dalam prinsip tersebut, tepatnya pada poin ke-6 dari 24 prinsip, menegaskan bahwa kerangka tata kelola SWF harus kuat dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan efektif guna menjamin akuntabilitas serta kemandirian operasional demi tercapainya tujuan SWF.³⁴ Dalam konteks struktur kepengurusan Danantara, pembagian peran ini masih perlu dikaji ulang. Kedekatan pengurus dengan ranah politik berpotensi mengganggu objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangat krusial untuk memastikan bahwa pengelola Danantara tidak terpengaruh kepentingan politik agar keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional, bukan kelompok atau golongan tertentu.

Keberhasilan pengelolaan badan SWF di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia, melalui Temasek dan Khazanah, menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pengurus SWF bebas dari intervensi politik maupun pemerintah. Kemandirian dan kebebasan pengambilan

³² Tempo. Com, Celios Temukan 8 Masalah dan Risiko Hukum Pembentukan Danantara, Apa Saja?, <https://www.tempo.co/ekonomi/celios-temukan-8-masalah-dan-risiko-hukum-pembentukan-danantara-apa-saja-1217651>, (diakses pada 27 Maret 2023).

³³ Tempo. Com, Struktur Danantara Dinilai Memberi Peluang Intervensi Politik dan Hanya Menambah Layer Birokrasi, <https://www.tempo.co/ekonomi/struktur-danantara-dinilai-memberi-peluang-intervensi-politik-dan-hanya-menambah-layer-birokrasi-1212061>. (diakses pada 27 Maret 2025).

³⁴ Revo M, Ini 24 Prinsip Santiago yang Jadi Acuan SWF Dunia Seperti Danantara, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250305125410-128-615863/ini-24-prinsip-santiago-yang-jadi-acuan-swf-dunia-seperti-danantara>, (diakses pada 27 Maret 2025).

keputusan oleh pengurus menjadi kunci agar setiap keputusan benar-benar mengedepankan kepentingan nasional. Namun, dalam pengaturan Danantara, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, terdapat potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses revisi dan pengundangan peraturan tersebut, yang mencakup minimnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan, saran, dan pertimbangan, serta kurangnya transparansi dalam penyebaran informasi terkait regulasi tersebut kepada masyarakat luas.³⁵

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa sejak tahap penyusunan, perancangan, hingga revisi suatu Undang-Undang, DPR wajib melakukan penyebarluasan informasi. Tujuan dari ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), adalah untuk memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat dalam menyampaikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan tersebut.³⁶ Selain itu, Pasal 96 dari undang-undang yang sama memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis. Hak ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun diskusi, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) dan (2). Namun, dalam praktik pelaksanaan revisi dan pengundangan peraturan terkait Danantara, mekanisme partisipasi publik ini tidak dijalankan oleh pemerintah. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan konstitusional dan dapat dikategorikan sebagai inkonstitusional. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tanpa dasar pengaturan hukum yang jelas serta tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berpotensi mengabaikan kepentingan publik secara luas.

Akibat dari kurangnya kejelasan dalam pengaturan, ketidakpercayaan masyarakat pun muncul secara otomatis, menimbulkan keraguan terhadap optimalisasi pengelolaan Danantara

³⁵ Indonesia Corruption Watch, Kertas Posisi Praharah BPI Danantara: Potensi "Kejahatan Sempurna" Korupsi?, <https://icw.or.id/sites/default/files/dokumen/Kertas%20Posisi%20ICW%20-%20Revisi%20Ketiga%20UU%20BUMN%20dan%20Danantara.pdf>, (diakses pada 27 Maret 2025).

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN 5234, Pasal 88 ayat (1) dan (2).

sebagai pusat investasi di masa depan. Selain itu, sumber dana Danantara yang berasal dari beberapa bank BUMN menimbulkan kekhawatiran terkait tujuan yang hendak dicapai. Dana yang dikelola bukan dana segar, melainkan dana masyarakat yang berputar melalui perbankan milik negara. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian atau kesalahan dalam pengelolaan dana ini, dampaknya dapat meluas ke seluruh perekonomian Indonesia. Dengan demikian, Danantara ibarat pedang bermata dua: jika dikelola dengan baik, tujuan peningkatan ekonomi nasional dapat tercapai, tetapi jika gagal, akan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan memaksimalkan tujuan investasi jangka panjang serta kemakmuran masyarakat Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Danantara. Pertama, pengurus Danantara harus berasal dari kalangan independen yang tidak memiliki afiliasi atau kepentingan pribadi tertentu, sehingga tata kelola dan keputusan dapat berjalan dengan sehat dan terjamin. Kedua, pengelolaan investasi harus difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memberikan dampak dan keuntungan jangka panjang, seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, manufaktur, dan infrastruktur digital.³⁷

Karena bidang-bidang tersebut sangat menjanjikan di masa depan, terutama mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat, maka fokus investasi Danantara harus diarahkan ke sektor-sektor tersebut. Selanjutnya, pengelolaan Danantara harus bebas dari pengaruh politik. Oleh karena itu, manajemen harus diserahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang investasi serta keuangan. Masalah yang kerap terjadi di Indonesia terkait kebijakan adalah minimnya transparansi, yang menyebabkan berkurangnya mekanisme pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Danantara dapat memanfaatkan teknologi dalam melakukan pemantauan kinerja secara real-time. Dengan demikian, setiap keputusan dan perkembangan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Terakhir, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami secara menyeluruh tentang Danantara, termasuk tujuan, kepentingan, tata kelola, serta aspek-aspek lain yang berkaitan. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi sangat krusial agar masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan Danantara secara aktif.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah dijelaskan sebelumnya, harapan agar Danantara berhasil menjadi salah satu badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) terbesar di

³⁷ Kompasiana. Com. Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara. <https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-bentuk-danantara>. (diakses pada 19 Maret 2025).

dunia dapat terwujud apabila orientasinya berfokus pada upaya jangka panjang serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan negara-negara seperti Malaysia dan Singapura dalam membentuk badan SWF didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, serta pengawasan yang ketat. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi contoh dan landasan utama dalam pengelolaan Danantara di Indonesia, mengingat badan ini diharapkan dapat berperan sebagai super holding yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

D. KESIMPULAN

Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah lembaga strategis yang dibentuk untuk mengelola investasi dan dana publik di Indonesia, berperan sebagai penasihat sekaligus eksekutor dalam pengelolaan BUMN. Tugasnya mencakup pengaturan dividen, restrukturisasi, serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan BUMN. Secara konseptual, Danantara mirip dengan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia, namun berbeda dalam pendekatan hukum dan operasional. Jika SWF tersebut beroperasi berdasarkan undang-undang perusahaan negara dan bergerak di berbagai sektor strategis, Danantara didirikan melalui persetujuan DPR atas perubahan UU BUMN (UU No. 1 Tahun 2025). Keunikan Danantara terletak pada fokusnya menghimpun dan mengelola dana dari BUMN untuk mendorong investasi asing dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pembentukan ini menunjukkan upaya pemerintah mengadopsi praktik internasional yang disesuaikan dengan konteks nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Danantara: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi. Fakultas Syariah UIN Surakarta. <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>.
- Annisa Ayu Artanti. Danantara Vs Temasek: Mengupas Struktur, Strategi, dan Prestasi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/akW2aX0b-danantara-vs-temasek-mengupas-struktur-strategi-dan-prestasi>
- ANTARA. strategi untuk mengurangi risiko dengan cara menyebar dana ke berbagai instrument. <https://www.antaraneews.com/berita/2103118/khazanah-raih-rp11-triliun-dari-penempatan-saham-telekom-malaysia>.
- Bari Baihaqi. Danantara Disebut Sebagai SWF Terkuat ke 6 di Dunia. <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/216345/danantara-disebut-sebagai-swf-terkuat-ke-6-di-dunia>.

- CNN. Indonesia. Mengenal Sovereign Wealth Fund di Tengah Peluncuran Danantara. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250224145053-92-1201856/mengenal-sovereign-wealth-fund-di-tengah-peluncuran-danantara>.
- Danantara Indonesia Sovereign Fund. Daya Anagata Nusantara. Untuk Kemakmuran Indonesia. <http://www.danantara.id/>.
- Dhaniswara K. Harjono. (2017). Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Dimas Cahya Kusuma. (2022) Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Gusti Grehenson. Pakar UGM Ungkap Dampak Positif dan Negatif Kemunculan Danantara, Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-ungkap-dampak-positif-dan-negatif-kemunculan-danantara/>.
- Internasional Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF). Khazanah Nasional Berhad. <https://www.ifswf.org/member-profiles/khazanah-nasional>.
- Kemenkeu.go.id. Mengenal Sovereign Wealth Fund, Dana Investasi untuk Masa Depan Bangsa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html>.
- Khazanah Nasional. Memajukan Malaysia Untuk Jangka Panjang. , <https://www.khazanah.com.my/who-we-are/about-us/?lang=ms>.
- Kompasiana. Com. Mengenal Temasek, Inspirator Bagi Danantara. <https://www.kompasiana.com/fery50973/67bd4f1bc925c47b2228a3c2/mengenal-temasek-proyeksi-bentuk-danantara>.
- Margareth Henrika Silow. Danantara: Menjadi Model SWF Sukses Ala Norwegia atau Sekadar Sarang Korpsi?. <https://kumparan.com/henrika-silow/danantara-menjadi-model-swf-sukses-ala-norwegia-atau-sekadar-sarang-korupsi-24aHX0CqOAH>.
- Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Edisi Kedua. Makassar: CV. Nur Lina.
- Muhammad Jamaludin. (2023). Indonesia Investment Authority sebagai SWF Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. AL ADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 1, No. 2.
- Randy Wirayuda. Antara Temasek, 1MDB, dan Danantara. <https://historia.id/ekonomi/articles/antara-temasek-1mdb-dan-danantara-6mgE9>.
- Revo M. RI Punya Danantara: Ini 10 Dana Investasi Pemerintah Penguasa Dunia. , <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241107110729-128-586396/ri-punya-danantara-ini-10-dana-investasi-pemerintah-penguasa-dunia>.
- Sampor Ali. Mengenal Danantara, 'Barang Baru' di Era Prabowo. Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/mengenal-danantara-barang-baru-di-era-prabowo/>.
- Sinar Harian. Khazanah Nasional Berada di Landasan Tepat. <https://www.astroawani.com/berita-bisnes/khazanah-nasional-berada-di-landasan-tepat-508019>.

- Temasek. Sejarah Temasek. <https://www.temasek.com.sg/en/about-us/history-of-temasek>.
- Tempo. Com. Mengenal Temasek Holdings, BUMN Singapura yang Disebut-sebut Akan Ditiru Prabowo. [https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru prabowo](https://swa.co.id/read/451853/mengenal-temasek-holdings-bumn-singapura-yang-disebut-sebut-akan-ditiru-prabowo).
- Troy Segal. Temasek Holdings: Apa itu, Bagaimana Cara Kerjanya. <https://www.investopedia.com/terms/t/temasek-holdings.asp>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Willa Wahyuni. Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya, HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-1t67b5de78c441a/?page=2>.